
Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar

Riki Sutarno¹, Surya Hadi Darma², Dyah Wulandari³

¹²³Pendidikan Agama Islam, STAI DR KH EZ Muttaqien Purwakarta

¹²³Jln. Baru terusan Maracang No. 35 Ciwareng - Purwakarta

sutarriki@gmail.com¹, hadidarmasurya@gmail.com², dyahwulandari970@gmail.com³

ABSTRAK

Pendidikan multikultural pada pesantren merupakan satu usaha kongkret dalam menangani masalah pandangan monolitik, sukuisme, dan intoleransi santri. Karakter-karakter daerah yang dibawa kedalam lingkungan Pesantren melahirkan kemultibudayaan yang dapat menimbulkan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan tentang masalah-masalah diatas dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Adapun pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi dan observasi partisipatif. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Direct dan Indect Impact on Implementation dari George C Edward. Hasil penelitian ini bersimpul pada kesimpulan bahwa proses implementasi Pendidikan multicultural pada Pesantren Tahfidz Al-Muchtar telah terlaksana dengan baik melalui proses sosialisasi, penerapan dan pengawasan, serta evaluasi. Adapun komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi pendidikan multikultural sudah dirasa baik. Namun, pada variabel sumber daya, dan struktur birokrasi terdapat kekurangan yaitu; sumber daya fisik berupa bangunan asrama putri. Sedangkan pada variabel struktur birokrasi yaitu tidak adanya dokumen terkait SOP dan struktur organisasi pelaksana.

Kata Kunci : Pendidikan, Multikultural, Implementasi, Pesantren

ABSTRACT

Multicultural education in Islamic boarding schools is a concrete effort to deal with the problems of monolithic views, tribalism and intolerance among students. The regional characters brought into the Islamic boarding school environment give rise to multi-culturalism which can give rise to conflict. This research aims to analyze and describe the above problems using a qualitative case study approach. The data collection used interview techniques,

documentation and participatory observation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusion verification. This research uses George C Edward's Direct and Indirect Impact on Implementation theory. The results of this research conclude that the process of implementing multicultural education at the Tahfidz Al-Muchtar Islamic Boarding School has been carried out well through the process of socialization, implementation and supervision, as well as evaluation. The communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the implementation of multicultural education are considered good. However, in the resource variables and bureaucratic structure there are shortcomings, namely; physical resources in the form of a girls' dormitory building. Meanwhile, the bureaucratic structure variable is the absence of documents related to SOPs and implementing organizational structures.

Keywords : Education, Multicultural, Implementation, Islamic Boarding School

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang majemuk dengan keragaman budaya, ras, bahasa, kelompok maupun agama. Hal ini dianggap sebagai dilemma, pada satu sisi hal ini dapat menimbulkan hal positif, misalnya memiliki kekayaan budaya yang beragam. Namun, disisi yang lain hal ini dapat memicu hal negatif sebab keragaman budaya, ras, kelompok maupun agama ini seringkali menjadipemicu konflik. Ditengah masyarakat multikultur seperti di Indonesia ini, benturan antar kelompok masyarakat yang berbeda agama maupun adat tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, pemahaman tentang hubungan antar umat beragama maupun hubungan antara manusia dianggap penting diajarkan dalam pendidikan.

Pesantren merupakan salah satu jalan alternatif yang cocok dalam pembelajaran multi-etnis dan toleransi para santrinya. Sebab Pesantren bisa dikatakan sebagai cermin dari Masyarakat majemuk. Para santri yang berasal dari berbagai daerah menjadikan lingkungan pesantren menjadi lingkungan yang multi-etnis.

Pendidikan multikultural merupakan salah satu usaha kongkrit untuk menangkal pemahaman intoleransi. Marjuni menyampaikan bahwa Penerapan pendidikan multikultural pada Pesantren tentu akan mengurangi dan pandangan sukuisme pada diri anak. Lebih jauh lagi, pendidikan multikultural akan mengikis habis pandangan-pandangan monolitik, yang senantiasa memposisikan diri dan kelompoknya yang paling baik, benar, dan mulia, yang sungguh tidak Islami (Marjuni, 2018).

Karakter-karakter daerah yang dibawa menjadikan lingkungan Pesantren multi budaya, dalam hal ini pihak Pesantren seyogyanya dapat mengatasi kemungkinan gesekan-gesekan yang menimbulkan konflik dari perbedaan tersebut, dengan

mengimplementasikan pendidikan multikultural dalam Pesantren.

Sebagai sebuah kebijakan, Pendidikan multikultural memerlukan perjalanan Panjanguntuk dapat direalisasikan. Sebagaimana sebuah kebijakan, tentunya memerlukan proses dalam pengimplementasiannya. Adapun implementasi merupakan aktivitas para pelaksana kebijakan dalam merealisasikan kebijakan demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan bersama. Selain itu, implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pesantren Tahfidz Al-Muchtar merupakan salah satu Lembaga Pendidikan dibawah Yayasan Akomto Desa Benteng. Yayasan Akomto Menghimpun Lembaga Pendidikan lain yaitu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dan Sekolah Menengah Atas Islam terpadu. Pesantren ini baru berdiri sekitar 6 tahun dan terdapat santri dari berbagai daerah. Meskipun mayoritas santri merupakan etnis sunda, namun tidak menutup kemungkinan ada gesekan-gesekan kultural didalamnya. Karena meskipun satu etnis, para santri berasal dari berbagai kota yang menandakan ada berbagai karakter kultur yang dibawa.

Pesantren Tahfidz Al Muchtar secara natural menerapkan Pendidikan multicultural. Hal ini ditandai oleh beberapa hal, diantaranya; pertama, Pesantren Tahfidz AlMuchtar menerapkan pola asrama. Dimana santri dari berbagai daerah itudibiasakan untuk hidup bersama dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kedua, Pesantren Tahfidz Al Muchtar Melaksanakan pembelajaran kitab dengan logat jawa, meskipun masyoritas santri merupakan etnis sunda. Ketiga, dalam praktiknya Pesantren Tahfidz Al Muchtar menyediakan sarana pengembangan potensi santri pada beberapa kegiatan yang identik dengan praktik Pendidikan multicultural. Diantaranya, Pencak silat, Kepramukaan. Selain itu, tidak jarang santri-santri melakukan perundungan terhadap santri lain. Hal ini menandakan ada beberapa masalah dalam pengimplementasian Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar.

Dari beberapa hal diatas, dapat dikatakan diindikasikan terdapat beberapa masalah diantaranya, dalam Proses Implementasi Pendidikan Multikultural, Komunikasi dalam Implementasi Pendidikan Multikultural, Sumber daya Implementasi Pendidikan Multikultural, Disposisi dalam Implementasi Pendidikan Multikultural, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pendidikan Multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan tentang bagaimana proses Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar, bagaimana komunikasi dalam Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar, bagaimana sumber daya dalam Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar, bagaimana disposisi dalam Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar, serta struktur birokrasi dalam Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar.

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu kependidikan khususnya mengenai Pendidikan Multikultural pada Pondok Pesantren. Selain itu, penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi praktisi kependidikan dan masyarakat pada umumnya, tentunya dalam menyajikan paradigma serta pemecahan masalah yang muncul dampak dari kemajemukan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Moleong mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Siyoto & Sodik, 2015). Selanjutnya, adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah Studi kasus yang merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, suatu kelompok, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori (Abdussamad & Sik, 2021).

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan). Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2016). Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono dalam bukunya analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016). Adapun proses analisis data dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren muncul pertama kali di Indonesia pada abad ke-16 M, yakni terdapat di Ampel Denta dalam asuhan Sunan Ampel. Pada waktu itu, beliau mengkader santri-santrinya untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ada yang ditugaskan hingga ke negara-negara tetangga. Darimurid-murid Sunan Ampel inilah, kemudian menjamur Pesantren-Pesantren di seluruh penjuru tanah air. Puncaknya adalah pada awal pertengahan abad ke-19 sertaawal abad ke-20, yaitu pada masa Syekh Kholil Bangkalan. Dari tangan dingin beliau munculah kiai-kiai besar Nusantara yang kemudian dapat menetaskan kiai-kiai besar lainnya. Puncaknya, pada waktu itu hampir

di setiap kota kecamatan hingga di setiap desa berdiri satu Pesantren atau bahkan lebih. Dalam perjalanannya, muncul pengklasifikasian Pesantren di Indonesia berdasarkan sistem atau jenis lembaga pendidikan yang diadakannya (Muhakamurrohman, 2014).

Pesantren merupakan Lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan aspek moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Mahdi, 2013). Kata Pesantren lebih dikenal dengan sebutan pondok, istilah pondok berasal dari kata Arab *funduq*, yang berarti pesangrahan atau penginapan bagi para musafir. Ada juga yang menyebutkan bahwa Pesantren mengandung makna ke-Islaman sekaligus keaslian (*indigenous*) Indonesia. Kata "Pesantren" mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid Pesantren, sedangkan kata "santri" diduga berasal dari istilah sansekerta "sastri" yang berarti "melek huruf", atau dari bahasa Jawa "cantrik" yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Selain itu juga menyebutkan bahwa Kata Pesantren yang berasal dari akar kata santri dengan awalan "Pe" dan akhiran "an" berarti tempat tinggal para santri. Para ahli berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti Guru mengaji, dari sini kita memahami bahwa Pesantren setidaknya memiliki tiga unsur, yakni; Santri, Kyai dan Asrama. Sehingga dengan demikian dari asal kata, maka dapat kita ambil benang merah mengenai pengertian Pesantren secara istilah yakni, Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan islam yang menampung sejumlah santri maupun santriwati dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan seorang kyai (Abdurrahman, 2020).

Implementasi Pendidikan Multikultural di Pesantren Tahfidz Al Muchtar merupakan salah satu upaya Pesantren dalam membentuk karakter santri yang demokratis, pluralis, dan berwawasan global. Pendidikan multikultural di Pesantren terjadi secara natural, sebagaimana visi Pesantren kami yaitu Terwujudnya Santri yang Hafidz Alquran, Terampil, Sehat, Produktif serta Berwawasan Global. Berwawasan global berarti harus plural, mengerti dan menghargai perbedaan antar manusia, serta bersikap demokratis.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk Tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2016). Adapun teori yang disajikan oleh George C Edward III terkait dengan implementasikebijakan. Istilah yang dinamakan oleh Edward III pada teorinya yaitu, *Direct dan Indect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang di teoremakan olehEdward III, terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasisuatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Darma & Wulandari, 2022). Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabelkomunikasi diatas,

yaitu ; Transmisi, Kejelasan, dan konsistensi. Transmisi yang dimaksud adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan hasil yang baik pula. Kejelasan, dalam hal ini komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten. Sebab, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Adapun elemen sumberdaya diantaranya, staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumberdaya manusia. Informasi; implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan Tindakan dan informasi mengenai data kepetuhan yang telah ditetapkan. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah data dilaksanakan. Fasilitas; fasilitas berupa fisik juga tidak kalah penting dalam hal ini (Agustino, 2016). Disposisi atau kecenderungan pelaksana. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi diantaranya adalah efek disposisi, Melakukan pengaturan birokrasi, dan insentif. Hal terakhir yang memengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Edward adalah Struktur birokrasi. Menurut Edward III ada dua karakteristik yang mendongkrak kinerja implementasi dalam struktur birokrasi, yaitu Standar operating procedures (SOP) dan Fragmentasi. SOP sendiri merupakan suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bedangnya masing-masing (Agustino, 2016).

Selanjutnya Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*self of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan individu, kelompok, ataupun negara (Suryana et al., 2015). Howard berpendapat bahwa Pendidikan multikultural memberikan kompetensi multikultural. Menurutnya Pendidikan multikultural mampu membuat siswa menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan *usage* (cara individu bertingkah laku), *folkways* (kebiasaan yang ada di masyarakat), *mores* (tata kelakuan di masyarakat), dan *costums* (adat istiadat suatu komunitas) (Suryana et al., 2015). Adapun tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberikan peluang yang sama pada setiap anak. Jadi, tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai, saling

memahami, mengakhiri perbedaan, tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan (Suryana et al., 2015). Nilai-nilai Pendidikan multikultural sendiri dikemas oleh beberapa pakar diantaranya chorul Mahfud dalam bukunya Pendidikan multikultural mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam muatan Pendidikan multikultural diantaranya adalah nilai demokrasi, nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai kesetaraan (Mahfud, 2013).

3.1. Proses Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk Tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2016).

Adapun teori yang disajikan oleh George C Edward III terkait dengan implementasi kebijakan. Istilah yang dinamakan oleh Edward III pada teorinya yaitu, *Direct dan Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang di teoreman oleh Edward III, terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2016). Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi diatas, yaitu: Transmisi, Kejelasan, dan konsistensi. Transmisi yang dimaksud adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan hasil yang baik pula. Kejelasan, dalam hal ini komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten. Sebab, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Adapun elemen sumberdaya diantaranya, staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumberdaya manusia. Informasi; implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan Tindakan dan informasi mengenai data kepetuhan yang telah ditetapkan. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah data dilaksanakan. Fasilitas; fasilitas berupa fisik juga tidak kalah penting dalam hal ini (Agustino, 2016).

Disposisi atau kecenderungan pelaksana. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi diantaranya adalah efek disposisi, Melakukan pengaturan birokrasi, dan insentif. Hal terakhir yang memengaruhi implementasi kebijakan public menurut Edward adalah Struktur birokrasi. Menurut Edward III ada dua karakteristik yang mendongkrak kinerja implementasi dalam struktur birokrasi, yaitu Standar operating

prosedures (SOP) dan Fragmentasi. SOP sendiri merupakan suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bedangnya masing-masing (Agustino, 2016).

Proses implementasi Pendidikan multikultural di pesantren Tahfidz Al Muchtar meliputi proses Sosialisasi, Penerapan sekaligus pengawasan, kemudian evaluasi. Adapun proses sosialisasi Pendidikan multikultural dilakukan dengan melakukan penyadaran kepada masyarakat Pesantren pentingnya menghargai perbedaan, kesetaraan, berjiwa demokratis dan plural guna mempertahankan perdamaian umat. Proses sosialisasi dilaksanakan pada program penerimaan santri baru yang disebut ta'aruf. Program ini meliputi pengenalan antara keluarga pesantren dengan santri baru, kemudian program wawancara sebagai upaya komunikasi langsung antara pihak pesantren dengan keluarga baru pesantren untuk memperoleh informasi yang hendak didapatkan demi terwujudnya visi misi dan keberhasilan program kerja kedepan. Kemudian proses penerapan dilaksanakan berbarengan dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing pembimbing santri. Proses evaluasi dilaksanakan melalui rapat bulanan yang melibatkan para pelaksana.

Proses Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar telah terlaksana dengan baik. Pesantren Tahfidz Al Muchtar Melakukan Proses Implementasi melalui sosialisasi, penerapan serta pengawasan dan evaluasi. Proses sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan pelbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pihak pesantren melalui kebijakan yang diformulasikannya. Penerapan Pendidikan Multikultural pada pesantren Tahfidz Al Muchtar melalui beberapa program, diantaranya pola asrama, kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai demokrasi, peluralisme, humanisme dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pendidikan multikultural Chorul Mahfud dalam bukunya Pendidikan multikultural mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam muatan Pendidikan multikultural diantaranya adalah nilai demokrasi, nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai kesetaraan (Mahfud, 2013). Setelah sosialisasi, penerapan disertai dengan pengawasan, maka proses evaluasi dilaksanakan agar implementasi Pendidikan Multikultural berjalan dengan efektif. Proses evaluasi seluruh program di Pesantren Tahfidz Al Muchtar dilaksanakan melalui Rapat bulanan. Hal ini senada dengan Sasadara Wahyu Lukitasari dkk, yang menyampaikan bahwa Evaluasi sangat penting peranannya dalam manajemen yaitu untuk mengetahui ketercapaian dan efektifitas program. Sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kekurangan serta hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat diketahui yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, diteruskan ataupun

dihentikan pelaksanaannya (Lukitasari et al., 2017).

3.2 Komunikasi dalam Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar

Komunikasi yang dilakukan secara partisipatif dilakukan guna tercapainya efektifitas komunikasi dalam Pendidikan multikultural. Terkait kendala komunikasi dalam Implementasi Pendidikan Multikultural dinyatakan tidak ada kendala. Hal ini dikarenakan tersedianya alat komunikasi untuk menunjang komunikasi agar pesan yang disampaikan jelas dan diterima dengan baik. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa di Pesantren Tahfidz Al Muchtar proses komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik. Hal ini dilakukan dengan proses komunikasi yang terstruktur. Komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Selain itu, untuk konsistensi komunikasi antar pelaksana kebijakan diadakan rapat bulanan, sehingga informasi tersampaikan dengan baik terhadap masyarakat pesantren. Hal ini sesuai dengan variabel komunikasi George C. Edward III, yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi (Agustino, 2016). Di Pesantren Tahfidz Al Muchtar hal ini dilaksanakan oleh dewan pengasuh terhadap pelaksanaan kebijakan lainnya terkait hak, kewajiban, tugas-tugas, dan wewenang. Informasi yang disalurkan oleh dewan pengasuh pada stafnya terbagi menjadi beberapa sifat, diantaranya informasi langsung, dan tidak langsung.

3.3 Sumber Daya dalam Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar

Pesantren Tahfidz Al Muchtar sudah memiliki pegawai yang cukup untuk mendukung proses Implementasi Pendidikan Multikultural. Adapun Pelatihan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dilakukan oleh pihak pesantren, karena Yayasan memiliki Sekolah, maka peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan-pelatihan sekolah. Sumber daya lainnya berupa anggaran, fasilitas fisik dan lainnya sudah cukup terpenuhi. Adapun sumber anggaran bersumber dari pihak Yayasan. Fasilitas fisik berupa bangunan, ruang belajar, dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagian sumber daya terutama sumber daya manusia sudah mencukupi, adapun kekurangan yaitu sumber daya berupa bangunan asrama.

Pengadaan kamar asrama, pembangunan kelas belajar baru, pengadaan koperasi, peningkatan kompetensi staf berkaitan dengan faktor sumber daya yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, termasuk kebijakan Pendidikan Multikultural. Sekalipun sebuah kebijakan telah terkomunikasikan dengan baik, tanpa fasilitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memadai maka implementasi sebuah kebijakan tidak akan maksimal tingkat keberhasilannya. Dengan begitu, pentingnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi implementor suatu kebijakan.

Adapun fasilitas fisik di Pesantren Tahfidz Al Muchtar dinilai cukup baik, apalagi tersedianya kamar asrama baru, dan bangunan kelas baru. Namun, pada kenyataannya

masih ada kekurangan fasilitas kamar asrama putri di Pesantren AlMughtar. Hal ini senada dengan teori George C Edward III bahwa ada beberapa variabel dalam sumber daya sebagai faktor implementasi sebuah kebijakan, yaitu Staf, Informasi, Wewenang, dan fasilitas (Agustino, 2016). Meskipun masih ada fasilitas yang belum cukup baik, tidak mempengaruhi lajunya Implementasi Pendidikan Multikultural Pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar.

3.3.1 Disposisi dalam Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar

Terkait disposisi Pesantren Tahfidz Al Muchtar membangun komitmen dari kaderisasi dalam penjangkaran pelaksana. Hal ini sebagai usaha pihak pesantren untuk tetap menjaga kultur dan komitmen pelaksana. Selanjutnya Pihak Pesantren Melakukan pengaturan *staffing* dengan memperhatikan kompetensi dan latar belakang pelaksana. Di Pesantren Tahfidz Al Muchtar, mulai dari dewan pengawas, staf, pengurus, guru, maupun pembimbing mendapatkan insentif, sekaligus tunjangan jika adadinas luar. Terlebih, pelaksana kebijakan juga diberikan fasilitas penuh. Sebagai pelaksana operasional diberi kendaraan untuk memudahkan operasional dan insentif, untuk hubungan masyarakat dan kebutuhan lain yang membutuhkan operasional kendaraan selain mempertahankan komitmen, insentif juga memeberikan tanggung jawab lebih terhadap pelaksan kebijakan. Selanjutnya pemberian fasilitas penuh, mulai dari tempat tidur, makan, listrik, air tentunya insentif juga. Hal ini yang membuat pengelola Pesantren Tahfidz Al Muchtar lebih bertanggung jawab atas Amanah yang diberikan.

Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar dilandasi dengan komitmen para pelaksana yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi penjalanan program-program penunjang Pendidikan Multikultural. Pengaturan birokrasi di Pesantren Tahfidz Al Muchtar sudah tertata dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam seleksi dan penerimaan pengurus pesantren. Pihak pesantren merekrut alumni pesantren untuk menjadi pengurus. Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksanaan kebijakan haruslah memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat pesantren. Kemudian manipulasi insentif diterapkan di Pesantren Tahfidz Al Muchtar, hal ini sebagai upaya Pihak Pesantren dalam memenuhi kepentingan pribadi. Untuk mengatasi permasalahan kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Hal ini sesuai dengan George C Edward III bahwa salah satu Teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Pada umumnya manusia bertindak menurut kepentingan sendiri, maka mempengaruhi Tindakan para pelaksanakebijakan (Agustino, 2016).

3.3.2 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar

Di Pesantren Tahfidz Al Muchtar struktur birokrasi sudah diterapkan dengan cukup baik. Mulai dari struktur pengurus Pesantren sampai dengan struktur pengurus pada tahap santri. Sikap demokrasi santri sebagai salah satu nilai Pendidikan multikultural sudah kami terapkan. Namun, pada pembuatan SOP belum terlaksana secara optimal, hanya saja fragmentasi yang telah terselenggarakan namun tidak dalam bentuk dokumen fisik. Pembagian tanggung jawab, wewenang dan hak setiap pengurus sudah di amanahkan melalui lisan begitupun standar operasi kerjanya. Dalam segi administrasi ada beberapa terkendala, yakni perlunya pembenahan administrasi karena pengurus Pesantren masih sangat sedikit, masih fokus terhadap administrasi sekolah agak bisa mendapatkan nilai akreditasi. Semua Pelaksana terlibat dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan musyawarah mufakat pada saat rapat bulanan.

Meskipun didukung dengan komunikasi yang baik, didorong oleh sumber daya yang mumpuni, dan sikap pelaksana yang komit, implementasi suatu kebijakan tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan struktur birokrasi yang baik. Menurut George C. Edward III ada dua variabel yang mempengaruhi faktor struktur birokrasi yaitu standar Operating Prosedures atau SOP, dan Fragmentasi (Agustino, 2016).

Di Pesantren Tahfidz Al Muchtar SOP yang disediakan lebih fleksibel. Meskipun SOP belum terdokumentasikan dengan baik, tetapi pegawai pesantren telah mengetahui tugas, kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Sedangkan fragmentasi bertujuan untuk menyebarkan tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di Pesantren Tahfidz Al Muchtar sendiri implementasi setiap kebijakan terfragmentasi dengan baik, meskipun SOP belum terdokumentasikan dengan baik berupa narasi, namun tugas-tugas para pelaksana kegiatan sudah tahu tugas dan kewajiban masing-masing bidang, sekalipun satu pelaksana kegiatan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena satu hal, namun karena terfragmentasi, dan terkomunikasikan dengan baik kepada para pelaksana, tidak menjadi hal yang menghambat jalannya operasional implementasi Pendidikan multikultural di Pesantren Tahfidz Al Muchtar.

Dari pembahasan diatas, dapat dikatakan bahwa Implementasi Pendidikan Multikultural di Pesantren Tahfidz Al Muchtar telah terlaksana dengan cukup baik. Meskipun ada beberapa kendala, diantaranya dalam aspek sumber dayadan struktur birokrasi, namun hal tersebut belum terlalu mempengaruhi secara signifikan terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar.

4. SIMPULAN

Proses implementasi Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan telah terlaksanakannya program-program unggulan melalui program ekstrakurikuler. Proses Implementasi

dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya sosialisasi, penerapan serta pengawasan, kemudian dilakukan evaluasi. Komunikasi dalam Pendidikan multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar telah dilaksanakan dengan baik. Sumberdaya dalam Pendidikan multikultural pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, ada beberapa kekurangan pada sumber daya fisik berupa bangunan asrama putri yang belum cukup untuk santri. Disposisi pelaksana dalam pada Pesantren Tahfidz Al Muchtar cukup baik. Hal ini dilaksanakan melalui manipulasi insentif demi menjaga komitmen dan pemenuhan kebutuhan pribadi para pelaksana sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, pada aspek struktur birokrasi terdapat beberapa kekurangan sehingga menghambat Implementasi Pendidikan Multikultural. Diantara kekurang tersebut yaitu, tidak adanya dokumen SOP, dokumen struktur organisasi, dan fragmentasi dijalankan hanya dengan perintah lisan. Hal ini disadari oleh Pesantren Tahfidz Al Muchtar sehingga dalam praktiknya hal ini menjadi suatu perbaikan untuk kedepan sekaligus menjadi salah satu implikasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2020). SEJARAH PESANTREN DI INDONESIA:: Sebuah Pelacakan Genealogis. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 4(1), 84-105.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Darma, S. H., & Wulandari, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Berkarakter di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 2(1).
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121-134.
- Mahdi, A. (2013). Sejarah Dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 2(1), 1-20.
- Mahfud, C. (2013). *Pendidikan multikultural*.
- Marjuni, M. (2018). *Pendidikan multikultural pada Pesantren Modern: Studi pada Pondok Pesantren Modern Dar El-Azhar Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muhakamurrohman, A. (2014). Pesantren: Santri, kiai, dan tradisi. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 12(2), 109-118.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Suryana, Y., Rusdiana, A., & Saebani, B. A. (2015). *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa: konsep-prinsip-implementasi*.